



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BNP2TKI,
PT. ASKES, DAN PT. JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang	:	2008-2009
Masa Persidangan	:	II
Jenis	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	BNP2TKI
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 1 Desember 2008
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta.
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membicarakan hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009.2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BNP2TKI.3. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum / Kabag Set. Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	:	37 Anggota dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI Ijin 12 orang.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua BNP2TKI dibuka pukul 14.25 WIB oleh Ketua Rapat, dr. Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX DPR RI), setelah kourum terpenuhi sebagaimana Tatib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Paparan Kepala BNP2TKI tentang relaisasi anggaran BNP2TKI tahun 2008, tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, dan berbagai masalah aktual yang berkaitan dengan bidang tugas BNP2TKI

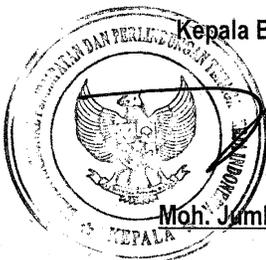
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah menerima masukan/tanggapan dari Anggota serta jawaban dari Kepala BNP2TKI maka Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan BNP2TKI pada hari ini mengambil Kesimpulan/Keputusan, sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI agar melakukan perubahan sistem terhadap pelaksanaan terminal khusus kedatangan TKI.
2. Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI sepakat untuk melakukan koordinasi dengan DEPNAKERTRANS RI bersama dengan DEPLU RI guna mengkaji tupoksi pelaksanaan pengiriman TKI mulai dari perekrutan, pemberangkatan, penempatan, dan perlindungan serta pemulangan untuk menghindari adanya *overlapping* antara BNP2TKI, DEPNAKERTRANS RI, dan DEPLU.
3. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar kompetensi bagi TKI sebelum pemberangkatan guna meningkatkan kualitas TKI dan menghindari TKI dari berbagai permasalahan di negara tempat bekerja.
4. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI agar meningkatkan, memprioritaskan, dan lebih menyiapkan TKI formal melalui perekrutan dan kerjasama dengan DIKNAS dalam program G to G atau G to P.
5. Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI mengusulkan agar DEPLU memberikan paspor diplomatik kepada atase tenaga kerja guna memperlancar pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri.

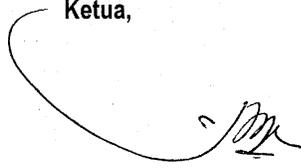
Rapat ditutup pukul 16.45 WIB

Jakarta, 1 Desember 2008


Kepala BNP2TKI,

Moh. Juhur Hidayat

Komisi IX DPR RI
Ketua,


dr. Ribka Tjiptaning